



TERKATUNG-KATUNG PERPANJANG SERTIPIKAT HGB

Warga Geruduk Kantor Pertanahan Kota Yogya

YOGYA (KR) - Lama terkatung-katung dalam mengurus perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), sekitar 50 warga dari DIY bahkan luar kota yang memiliki tanah HGB di Kota Yogya mendatangi Kantor Pertanahan (BPN) Kota Yogyakarta, Rabu (21/8).

Mereka minta kepastian apakah permohonan mereka ditolak atau bisa dilanjutkan dengan pembayaran agar izin perpanjangan cepat turun. "Kita lelah, sudah setahun lebih kami menunggu. Padahal tanah HGB itu kita beli dengan tetes keringat dan air mata. Kok sekarang digantung sehingga tanah tidak bisa dijadikan agunan atau dijual/pindah tangankan," ucap salah satu warga pemegang HGB, ZS Lokasari.

Disebutkan, setiap warga ingin mengetahui kebijakan Kantor Pertanahan sehingga semua warga yang hadir ingin ikut beraudiensi dan tidak diwakilkan. Rombongan diterima staf BPN Kota Yogya Munakam, Satria dan Wiji mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogya Rudi Prihantoro APTnh MM MH yang berha-

langan hadir.

"Kami kecewa, Pak Rudi berjanji menemui kita tapi justru keluar kantor. Padahal kita butuhkan keputusannya untuk nasib perpanjangan HGB kami," ucap Lokasari disambut celetukan warga lainnya yang kecewa izin perpanjangan HGB nya belum turun.

Menurutnya, saat ini ada sekitar 800-an pemilik HGB yang digantung perpanjangan HGB nya yang menimbulkan keresahan. "Herannya ada yang HGB-nya bisa diperpanjang, khususnya yang menjadi jaminan bank, sedang kita dinyatakan tanah RVO (hak barat) peninggalan kolonial yang saat ini sudah tidak berlaku, sesuai pasal 55 UUPA 5/1960 RVO telah dikonversi menjadi HGB dan sejak 24 September 1980 menjadi tanah negara. Jadi HGB di atas

tanah negara bukan tanah RVO atau SG demi kepastian hukum dan azas legalitas maka "Sertifikat HGB para pemohon harus diperpanjang," tegasnya.

Sementara Munakam menyatakan, pihaknya hanya diberi tugas untuk menerima tamu, warga yang menyampaikan keluhan terkait HGB. "Namun kami tidak bisa memutuskan. Nanti keluhan warga ini akan kami sampaikan ke pimpinan,"

jasasnya.

Rencana hasil pertemuan ini akan disampaikan dalam pertemuan dengan Anggota Komisi 2 DPR RI, Riyanta, dalam kunjungan ke Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogya, Kamis (22/8). "Keluhan kita mendapat tanggapan serius dari Komisi II DPR RI, dan berharap kebijakan yang bisa mengayomi rakyat dalam hal pertanahan," tegas Lokasari. **(Vin)-f**



KR-Juvintarto

Warga menggeruduk Kantor Pertanahan Kota Yogya menanyakan nasib perpanjangan sertipikat HGB.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005